



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Nurul Fitri 'Amalia<sup>✉</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Juni 2013  
Disetujui Juli 2013  
Dipublikasikan Agustus 2013

*Keywords:*  
Financial Region  
Supervision, Knowledge of  
Council About Budget,  
Personal Background,  
Political Background, The  
Role Members of DPRD

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo sejumlah 45 orang. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan Pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, lama kerja di pemerintahan dan pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan jabatan di partai politik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

### Abstract

*The purpose of this study to examine the influence of the personal background, political background and knowledge of council about budget on the role members of DPRD on financial region supervision. The population of this research are all members of DPRD Purworejo regency about 45 people. Multiple regression analysis was employed to analyse data. The result shows that variable of education and training, organizational experience, length of employment in government and experience in DPRD does not effect on the role members of DPRD on financial region supervision. While position on political parties and knowledge of council about budget have positive effects on the role members of DPRD on financial region supervision.*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Gdg. C6 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang, 50233  
E-mail: [amalianurulfitri@yahoo.co.id](mailto:amalianurulfitri@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APDB). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak positif bagi pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif).

DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu, program kerja yang rancang dalam anggaran belum sesuai dengan prioritas daerah dan mengakibatkan terbuka

peluang yang besar permasalahan anggaran seperti penyelewengan anggaran. Lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh sistem politik dan individu sebagai pelaku politik (Sastroatmodjo, 1995).

Pada kenyataannya masih terjadi banyak kasus dan penyalahgunaan yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di pemerintah Kabupaten Purworejo, korupsi APBD oleh Bupati Purworejo pada tahun 2004 yang penanganannya masih berlangsung sampai tahun 2010 (InfoKorupsi.com, November 2012). Selain itu kasus korupsi dana fasilitas APBD pada tahun 2006 oleh Bupati Purworejo. Kasus ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2,517 miliar (InfoKorupsi.com, November 2012). Selain kasus-kasus tersebut, masih terdapat kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp283.734.000. kasus ini terjadi tahun 2005-2010 dan terungkap pada bulan Agustus 2010. Tersangka diduga melakukan kesalahan karena mencairkan pinjaman sendiri dan menerima setoran dari nasabah (Purworejo Online News, Mei 2011). Permasalahan tersebut dapat timbul dapat dikarenakan kurangnya peran DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD). Salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi pengawasan. Dalam pendekatan behaviorisme, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu untuk menelaah perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukanlah lembaganya, melainkan yang ditelaah adalah latar belakang individu yang menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Dalam penelitian ini yang terkait dengan perilaku individu adalah peran anggota DPRD. Latar belakang individu dalam penelitian ini adalah *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

*Personal background* merupakan variabel individu yang merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini *Personal background* yang dimaksud adalah Strata Pendidikan, Pengalaman organisasi, dan lama kerja di pemerintahan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni dan Witono (2003) variabel *Personal background* yang meliputi strata pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Winarna dan Murni (2007) menunjukkan bahwa variabel *Personal background* yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan menunjukkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel *Personal background*, yaitu strata pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menguji kembali hasil penelitian dari Witono dan Murni (2007).

*Political background* merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. *Political background* dalam penelitian ini meliputi Pengalaman di DPRD dan jabatan di parpol. Menurut studi yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), variabel *Political background* secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa variabel *Political background* yang meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik, dan asal komisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selain variabel *personal background* dan *political background* terdapat faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap

pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) (Dewi, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasirwan (2009) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk diperhatikan karena pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi. Peran dalam penelitian ini merupakan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Peran, pola pikir dan tindakan seseorang yang mempunyai strata pendidikan yang tinggi akan sangat berbeda dengan peran, pola pikir dan tindakan seseorang yang mempunyai strata pendidikan yang rendah.

Pengalaman organisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah pengalaman anggota dewan dalam berbagai organisasi yang diikuti oleh anggota dewan sebelum terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD. Berdasarkan pendekatan belajar yang memfokuskan pada perilaku individu dalam suatu masyarakat/ organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Maka dalam penelitian ini ini, perilaku seseorang/ anggota DPRD ditentukan atau dipengaruhi oleh pengalaman organisasi anggota DPRD tersebut, dimana dalam organisasi tersebut, merupakan proses belajar seseorang.

Lama kerja di pemerintahan merupakan proses belajar seseorang dalam lingkup pemerintahan, semakin lama seseorang bekerja dalam lingkup pemerintahan, maka pengalaman seseorang akan semakin banyak, hal ini akan

mempengaruhi perilaku dan peran orang tersebut. Lama kerja di pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama waktu yang telah

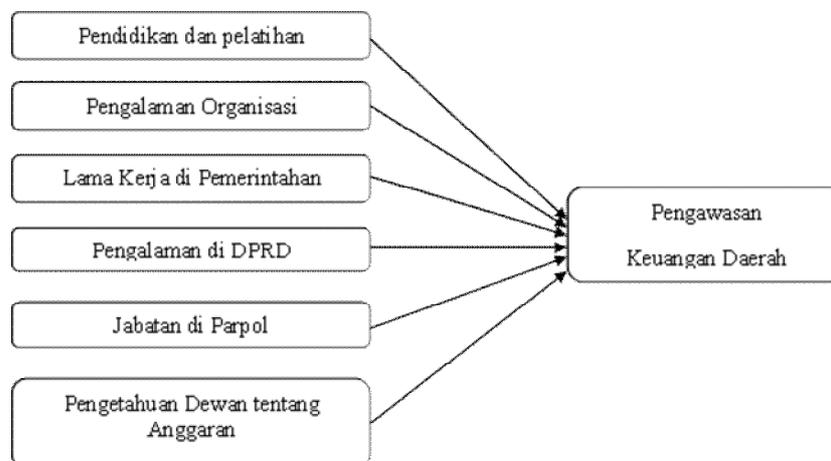
dijalan oleh anggota dewan dalam lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan ini akan diukur dengan skala rasio, yaitu dengan ukuran berupa lama tahun. Pemilihan variabel lama kerja di pemerintahan sebagai variabel independen ini didasarkan pada saran penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007).

Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Dalam suatu tata pemerintahan seperti DPRD terdiri dari anggota DPRD yang bervariasi, ada orang-orang yang baru saja pertama kali terpilih menjadi anggota dewan, ada anggota dewan yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya, bahkan ada pula yang merupakan orang-orang baru dalam suatu dunia perpolitikan. Pengalaman merupakan bekal yang baik dan akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu organisasi. Dengan penjelasan tersebut, maka pengalaman di DPRD berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran

anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Seorang anggota dewan harus mampu memahami dan mengaplikasikan hak, tugas, dan wewenangnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai pihak yang diberi wewenang sebagai wakil rakyat, yang diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga jabatan di partai politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011). Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### Hipotesis Penelitian

- $H_1$  : Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- $H_2$  : Pengalaman organisasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- $H_3$  : Lama kerja di pemerintahan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- $H_4$  : Pengalaman di DPRD berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
- $H_5$  : Jabatan di parpol berpengaruh positif terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah.
- $H_6$  : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner yang disebarkan kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2009-2014. Dengan menggunakan metode populasi, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2009-2014 sejumlah 45 orang.

### Variabel Penelitian

#### Variabel Dependen

#### Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD

merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan bukan pemeriksaan. pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Nasirwan, 2009). Variabel dependen ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS); 2= Tidak Setuju (TS); 3= Tidak tahu (TT); 4= Setuju (S); dan 5= Sangat Setuju (SS). Jawaban nilai tersebut memiliki nilai antara 5– 50. Dalam penelitian ini, kuesioner penelitian untuk mengukur variabel peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah mengadopsi dari penelitian Kartikasari (2012).

#### Variabel Independen

#### Pendidikan dan Pelatihan ( $X_1$ )

Strata pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang baku mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, reposponden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

#### Pengalaman Organisasi ( $X_2$ )

Pengalaman organisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah pengalaman anggota dewan dalam berbagai organisasi yang diikuti oleh anggota dewan sebelum terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju),

skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

#### **Lama Kerja di Pemerintahan (X<sub>3</sub>)**

Lama kerja di pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama waktu yang telah dijalani oleh anggota dewan

dalam lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan ini akan diukur dengan skala rasio, yaitu dengan ukuran berupa lama tahun. Pemilihan variabel lama kerja di pemerintahan sebagai variabel independen ini didasarkan pada saran penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007). Variabel ini diukur dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang akan dijawab oleh responden.

#### **Pengalaman di DPRD (X<sub>4</sub>)**

Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Dalam penelitian ini, pengalaman di DPRD dihitung dengan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

#### **Jabatan di Partai Politik (X<sub>5</sub>)**

Jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju). Selain itu, indikator variabel ini juga ada yang diukur dengan pertanyaan terbuka untuk indikator jenis jabatan di partai politik.

#### **Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X<sub>6</sub>)**

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan

anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju). Dalam penelitian ini, Kuesioner penelitian untuk mengukur variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mengadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

#### **Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data primer dari responden menggunakan kuesioner, dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Metode penyebaran kuesioner dengan menggunakan *Personally Administrated Questionnaires*, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden (Dewi, 2011).

#### **Uji Kualitas Data**

Uji kualitas data kuesioner ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Sedangkan uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

### Metode Analisis Data

Metode analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 16.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini berarti setiap item pernyataan dalam kuesioner tersebut adalah valid.

#### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan oleh variabel pendidikan dan pelatihan (0,742), pengalaman organisasi (0,701), pengalaman di DPRD (0,748), jabatan di partai politik (0,750), pengetahuan dewan tentang anggaran (0,747) dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (0,760) lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, jabatan di partai politik, pengetahuan dewan tentang anggaran, dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah dapat dikatakan reliabel.

### Statistik Deskriptif

Pada Tabel 1. Variabel pendidikan dan pelatihan (PP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 30,14. Berdasarkan tabel 3.2, apabila dikategorikan dalam tiga kelompok, maka rata-rata variabel pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh anggota dewan berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 40 orang. Variabel pengalaman organisasi (PO) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 19,30. Berdasarkan tabel 3.3, apabila dikategorikan dalam tiga kelompok, maka rata-rata variabel pengalaman organisasi yang dimiliki oleh anggota dewan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD memiliki pengalaman organisasi kategori tinggi, yaitu sebanyak 29 orang. Variabel

pengalaman di DPRD (PD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 19,00. Berdasarkan tabel 3.4, apabila dikategorikan menjadi tiga kelompok, maka rata-rata variabel pengalaman di DPRD yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan beradapada kategori tinggi, yaitu sebanyak 28 orang. Variabel jabatan di partai politik (JAB) menunjukkan nilai rata-rata 26,39. Berdasarkan tabel 3,5, apabila dikategorikan menjadi tiga kelompok, maka rata-rata variabel jabatan di partai politik yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 24 orang. Variabel pengetahuan dewan terhadap anggaran (PDTA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 35,19. Dari tabel 3.6, apabila dikategorikan dalam tiga kelompok, maka rata-rata variabel pengetahuan dewan terhadap anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan berada pada kategori tinggi, sebanyak 34 orang. Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas, grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal dan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan hasil perhitungan rasio tersebut, rasio *skewness* 1,81 dan rasio *kurtosis* berada diantara -2 dan +2, maka distribusi residual data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10, maka dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel independen pendidikan dan pelatihan (PP), pengalaman organisasi (PO), lama kerja di pemerintahan (LKP), pengalaman di DPRD (PD), jabatan di partai politik (JAB), pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (PADPKD) dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, serta titik-

titik tersebut menyebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-Rata	Standar Deviasi
PADPKD	43	10-50	31-49	40,02	4,073
PP	43	7-35	22-35	30,14	2,623
PO	43	5-25	16-24	19,30	1,489
PD	43	5-25	15-23	19,00	1,852
JAB	43	7-35	21-35	26,39	2,761
PDTA	43	9-45	27-45	35,19	3,960

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

### Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pendidikan dan pelatihan sebesar -0,077, serta besarnya t hitung dari variabel pendidikan dan pelatihan adalah -0,377 dengan nilai signifikansi 0,738. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan  $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$  pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka  $H_1$  di tolak. Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh

terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Diduga seseorang yang memiliki pendidikan yang baik cenderung untuk mengesampingkan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menyebabkan peran seseorang tersebut menjadi tidak baik. Hasil penelitian ini konsisten penelitian Kartikasari (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien variabel pengalaman organisasi sebesar 0,273 dan besarnya nilai t hitung dari variabel pengalaman organisasi adalah 0,714 dengan nilai signifikansi sebesar 0,480. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan  $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$  pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka  $H_2$  di tolak. Hal ini disebabkan

**Tabel 2** Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.698	8.583		1.130	.266
PP	-.077	.230	-.050	-.337	.738
PO	.273	.382	.100	.714	.480
LKP	.048	.258	.024	.186	.854

PD	-.045	.341	-.020	-.131	.896
JAB	.604	.247	.409	2.447	.019
PDTA	.343	.158	.333	2.169	.037

a. Dependent Variable: Y

Karena pengalaman dalam organisasi merupakan proses belajar seseorang dan kemungkinan dalam proses belajar dalam organisasi tersebut, seseorang mengalami proses belajar yang tidak sehat sehingga mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengaplikasikan hasil belajarnya tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas, seperti pengalaman yang telah didapat oleh anggota dewan tidak diaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan salah satu fungsi DPRD yaitu melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga mengakibatkan pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien variabel lama kerja di pemerintahan sebesar 0,048 dan besarnya t hitung dari variabel tersebut sebesar 0,186 dengan nilai signifikansi 0,854. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan  $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$  pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka  $H_3$  di tolak.

lama kerja seseorang tidak menjadi tolok ukur utama dalam mengukur peran atau keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, seperti pada penelitian ini, lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, karena tidak dapat menjadi jaminan jika semakin lama kerja seseorang di pemerintahan dapat menjamin bahwa peran dan keaktifan seseorang tersebut menjadi lebih baik. Selain itu, jabatan di DPRD juga tidak dipengaruhi oleh sudah lama atau tidaknya anggota dewan tersebut bekerja di pemerintahan.

Nilai koefisien variabel pengalaman di DPRD sebesar -0,045 dan besarnya t hitung variabel I ni adalah sebesar -0,131 dengan nilai signifikansi 0,896. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan  $df = n-k-1 =$

$43-6-1 = 36$  pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka  $H_4$

di tolak. Hal ini disebabkan karena pengalaman di DPRD yang dimiliki oleh anggota dewan tidak sepenuhnya mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kartikasari (2011) yang menunjukkan bahwa Pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien variabel jabatan di partai politik sebesar 0,604 dan besarnya t hitung variabel ini adalah sebesar 2,447 dengan nilai signifikansi 0,019. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan  $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$  pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi kurang dari alpha (5%) maka  $H_5$  diterima.

Hal ini sesuai dengan pernyataan jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). DPRD dapat melaksanakan perannya dengan baik apabila setiap anggota dewan mengetahui dan memahami tugas, hak dan wewenangnya masing-masing. Setiap anggota DPRD diharapkan mampu mengaplikasikan setiap tugas, hak dan wewenang masing untuk mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Nilai koefisien variabel jabatan di partai politik sebesar 0,343 dan besarnya t hitung variabel ini adalah sebesar 2,169 dengan

nilai signifikansi 0,037. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan  $df = n - k - 1 = 43 - 6 - 1 = 36$  pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi kurang dari alpha (5%) maka  $H_0$  diterima. Hal ini disebabkan

karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Dewi (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  sebesar 0,432 yang berarti variabel dependen peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) dapat dijelaskan oleh variabel independen pendidikan dan pelatihan (PP), pengalaman organisasi (PO), lama kerja di pemerintahan (LKP), pengalaman di DPRD (PD) jabatan di partai politik (JAB) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA), atau 56,8 % peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dijelaskan di luar model regresi.

#### SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, lama kerja di pemerintahan dan pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel jabatan di partai politik dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian selanjutnya hendaknya instrument penelitian lebih dikembangkan dan menggunakan indikator yang lebih tepat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Alloh SWT dan terima kasih kepada almamater, dosen pembimbing, dosen penguji, seluruh keluarga Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNNES, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman Akuntansi B 2009, serta semua pihak yang telah membantu, doa, dukungan, kritik dan saran terlaksananya penelitian serta tersusunnya karya ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Indah Mustika. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kartikasari, Dewi. 2012. "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Kartikasari, Dewi. 2012. "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan

- Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)". *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Murni, Sri dan banu Witono. 2004. Pengaruh *Personal Background dan Political Background* terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Perspektif*, Vol. 9.
- Nasirwan. 2009. "Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, Transparansi kebijakan Publik dan Pendidikan/Pelatihan Sebagai Variabel Moderating". Dalam *Jurnal*.
- Pramita, Yulinda devi dan Lilik Andriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)". Dalam *Prosiding SNA XIII*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)". Dalam *Prosiding SNA X*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Korupsi Dana Fasilitas APBD: Vonis Hakim Untuk Bupati Purworejo Lebih Ringan*.  
<http://Infokorupsi.com> (19 November 20112)
- Tersangka Korupsi PNPM Ditahan*. <http://Purworejo.Online.News/Korupsi.htm> (20 November 2012)